

**ANALISIS KELAYAKAN USAHA KUD GEMAH RIPAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Khasim Pekanbaru Riau*



Oleh :

**MISPANDI
10671004773**

JURUSAN MANAJEMEN

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KHASIM
PEKANBARU
RIAU
2011**

ANALISIS KELAYAKAN USAHA KUD GEMAH RIPAH KABUPATEN ROKAN HULU

ABSTRAKSI

Oleh :

MISPANDI

Penulis melakukan penelitian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Gemah Ripah yang berada di Rimbajaya Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan usaha pada Koperasi Unit Desa Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu. Analisis dan penentuan tingkat kelayakan finansial dilakukan dengan menggunakan kriteria, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio (B/C Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan Net Present Value (NPV), setelah dikurangi jumlah PV benefit dengan PV cost maka diperoleh angka 24.628.470 ini menunjukkan angka lebih besar dari 0, sehingga menurut kriteria Net Present Value (NPV) layak dikembangkan dan mempunyai keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya dengan analisis Nilai Net Benefit Ratio setelah dibagi antara net benefit/cost ratio maka diperoleh angka sebesar 2.20677144, ini berarti bahwa nilai yang dihasilkan adalah lebih dari 1 ($Net\ B/C > 1$). Kemudian dengan menggunakan analisis Internal Rate Of Return (IRR). KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai nilai IRR sebesar 29%, jadi angka ini lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu sebesar 20%. Dengan demikian kriteria IRR layak dikembangkan dan investasi yang ditanamkan memberikan keuntungan yang relatif besar kepada pengusaha tersebut.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2	Perumus
an Masalah	4
1.3	Tujuan
dan Manfaat Penelitian	5
1.4	Sistemat
ika Penulisan	5

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1	Telaah
Pustaka	8
2.1.1	Pengerti
an Koperasi	8
2.1.2	Fungsi
Koperasi di Indonesia	9
2.1.3	Pendapa
tan Koperasi (Sisa Hasil Usaha)	9
2.1.4	Modal
Koperasi	
.....	10
2.1.5	Anggota
Koperasi	
.....	15
2.2 Teori Keseimbangan Usaha Koperasi	
.....	23
2.3 Teori Pendapatan	
.....	24
2.4 Analisis Kelayakan Usaha	
.....	26
2.5 Hipotesis	
.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Lokasi
	dan Waktu Penelitian	
	32
3.2	Jenis
	dan Sumber Data	
	32
3.3	Teknik
	Pengumpulan Data	
	32
3.4	Analisi
	Data	
	33

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1	Sejarah
	singkat KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu	
	39
4.2	Struktur
	organisasi	
	39
4.3	Aktivita
	si KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu.....	
	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Hasil
	Penelitian	
	43
5.2	Pembah
	asan	
	53

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimp
	ulan	106
6.2	Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Koperasi didirikan atas dasar landasan gotong royong dan tolong menolong tanpa ada unsur keterpaksaan. Setiap kegiatan usaha perekonomian apapun bentuknya pada umumnya tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh laba dan keuntungan. Berbagai tujuan yang dimaksud, begitu pula dengan koperasi, meskipun tujuan utama dari koperasi bukan untuk mencapai laba melainkan yaitu bentuk kerja sama yang diadakan oleh orang-orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan, maka koperasi mengadakan berbagai kegiatan usaha dalam upaya mencapai tujuan memperoleh laba yang diharapkan demi untuk mensejahterakan anggota khususnya dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Semakin besar Sisa Hasil Usaha (SHU) atau laba bersih, maka semakin bertambah pula kemampuan yang ada pada koperasi, karena suatu koperasi dikatakan berhasil apabila manfaat dari koperasi tersebut dinikmati seluruh masyarakat. Sehingga meskipun tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar keuntungan semata akan tetapi peningkatan pendapatan setiap tahunnya haruslah mencapai target. Karena maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh adanya laba atau rugi. Maka dengan adanya laba kekayaan akan bertambah dan dengan adanya kerugian harta akan berkurang. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi laba bersih (SHU) antara lain:

1. Naik turunnya jumlah unit dijual dengan harga per unit barang.
2. Naik turunnya harga pokok penjualan (hpp), ini dipengaruhi oleh jumlah pembelian atau penjualan per unitnya.
3. Naik turunnya pos pendapatan / penghasilan / biaya operasional / non operasional yang dipengaruhi jumlah per unit yang dijual atau dibeli termasuk berbagai kebijaksanaan antara lain penerimaan dan pemberian diskon.

Yang termasuk dalam keuntungan-keuntungan antara lain adalah:

1. Pendapatan-pendapatan baik dari penjualan barang atau jasa
2. Bunga yang diterima
3. Keuntungan dari penyertaan dan lain-lain

Maka setiap kegiatan usaha perekonomian hendaknya menghasilkan laba dan menekan biaya seminimal mungkin, kemudian yang termasuk dalam kerugian atau biaya antara lain: beban-beban usaha, biaya administrasi dan umum, harga pokok penjualan, pajak dan biaya-biaya lainnya. Pengeluaran-pengeluaran hendaknya dapat dilakukan efisiensi sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan usaha. Hal ini sangat penting karena untuk meningkatnya laba bersih.

Dengan adanya perhitungan laba atau rugi maka akan dapat diketahui dari mana saja datangnya keuntungan-keuntungan, pengeluaran-pengeluaran apa saja yang telah dilakukan dan pengeluaran-pengeluaran mana yang masih dapat dihemat. Meninjau perkiraan laba atau rugi bertujuan untuk memperbesar keuntungan, selisih antara jumlah keuntungan-keuntungan di sebut kredit dan

jumlah pengeluaran-pengeluaran disebut debet merupakan sisa hasil usaha (SHU) atau laba bersih.

Koperasi Unit Desa (KUD) Gemah Ripah yang berada di Desa Rimbajaya Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, koperasi ini didaftarkan di dalam departemen koperasi dan PPK Propinsi Riau dengan badan hukum No. 272 / BH / PAD / KD / 4 / I / VI / 2000, NPWP No.01.508.169.8. Koperasi ini mengelola beberapa unit usaha antara lain:

1. Unit usaha WASERDA
2. Unit usaha simpan pinjam
3. Unit usaha produksi kelapa sawit

Dalam rangka mengelola usahanya pengurus mengangkat beberapa karyawan untuk menjalankan usahanya yang setiap bulan diberikan gaji tetap dan insentif yang lainnya.

Penerimaan kotor KUD Gemah Ripah setiap tahun bukunya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena unit usaha yang memperoleh laba, akan tetapi laba bersih (SHU) setiap tahunnya meskipun mengalami peningkatan namun sangat minim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Rincian perkembangan SHU Koperasi Unit Desa Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2003-2007

No	Tahun	SHU
1	2003	Rp. 153.082.370,23
2	2004	Rp. 257.384.923,53
3	2005	Rp. 301.842.574,54
4	2006	Rp. 303.949.324,14
5	2007	Rp. 274.612.476,43

Sumber: Laporan Keuangan KUD Gemah Ripah.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya KUD Gemah Ripah mengalami peningkatan SHU, dimana pada tahun 2003 SHU yang diperoleh sebesar Rp. 153.082.370,23, kemudian meningkat pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 257.384.923,53, selanjutnya pada tahun 2005 menjadi Rp. 301.842.574,54, tahun 2006 sebesar Rp. 303.949.324,14, namun mengalami penurunan pada tahun 2007 yaitu menjadi sebesar Rp. 274.612.476,43, Hal ini dikarenakan penerimaan dari setiap unit usaha tidak dibarengi dengan efisiensi dalam penggunaan biaya.

Selisih penerimaan (keuangan) dengan pengeluaran-pengeluaran akan menghasilkan laba bersih. Besar kecilnya laba bersih akan dipengaruhi oleh penggunaan biaya. Penggunaan biaya ini sangat berperan terhadap hasil usaha bersih yang diharapkan. Jika dapat melakukan efisiensi biaya maka laba yang diharapkan akan tercapai, dan sebaliknya jika penggunaan biaya yang kurang memberikan kontribusi terhadap penerimaan dan seharusnya dapat di hemat, maka laba yang diharapkan belum dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul: **"Analisis Kelayakan Usaha KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu"**

I.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan permasalahan yaitu:

"Bagaimana Kelayakan Usaha pada KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu"

I.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kelayakan usaha pada Koperasi Unit Desa Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu.

Manfaat penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dapat dijadikan wawasan untuk melihat bagaimana pengembangan usaha Koperasi Unit Desa.
2. Bagi Koperasi sebagai sumbangan pemikiran dan juga sebagai bahan pertimbangan, oleh pengurus koperasi dalam pengelolaan koperasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat juga digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami, maka penulis membagi ke dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini seperti pengertian koperasi, jenis

koperasi, manajemen keuangan koperasi, laporan keuangan koperasi, manajemen koperasi, hipotesis beserta variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini memberikan uraian tentang sejarah singkat koperasi, struktur organisasi koperasi dan kegiatan koperasi

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

PENDAHULUAN

II.1 TELAAH PUSTAKA

II.1.1 Pengertian Koperasi

Secara umum yang di maksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut Bapak koperasi Moh.Hatta yang dikutip oleh Sitio (2001:17) koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.

Menurut Prof. R. S. Soeraatmadja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang dikutip oleh Hendrojogi (2002:22):

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia , dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (Widiyanti, 2002:2).

Pengertian koperasi telah dirumuskan oleh pemerintah di dalam Undang-undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum. Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan".

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Anggota koperasi yang terdiri dari orang per orang ataupun badan hukum termasuk ke dalam kategori ekonomi lemah karena koperasi adalah wadah untuk bergabung dan berusaha secara bersama agar kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan ekonomi dapat diatasi atau setidaknya dapat diperkecil, oleh karena itu koperasi merupakan suatu alas bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong diri sendiri sehingga mampu berusaha memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan. Sifat khas ini membedakan koperasi dengan badan ekonomi lainnya.

II.1.2. Fungsi Koperasi di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 Bab III pasal 4 tentang fungsi dan peranan koperasi :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan sertanya secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi-ekonomi.

II.1.3 Pendapatan Koperasi (Sisa Hasil Usaha)

Koperasi menyebut laba dan keuntungan dengan nama Sisa Hasil Usaha (SHU) sehubungan dengan koperasi tidak mengutamakan laba, kalau Sisa Hasil Usahanya yang diperoleh adalah akibat dari pada usaha dalam melayani kepentingan anggotanya dan usaha koperasi jangan merugi, maka sisa hasil usahanya kena pajak. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan dari biaya tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha ini terdiri atas :

1. Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.
2. Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga.

Pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 menyebutkan :

1. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi Berta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Sisa Hasil Usaha yang dicatat dalam laporan keuangan akan dibagikan anggota sesuai dengan kebijakan masing-masing koperasi. Agar supaya Sisa Hasil Usaha atau surplus tersebut dapat dibagikan secara tepat dan adil kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk :

- a. Cadangan koperasi.
- b. Anggota sebanding dengan jasa yang berikutnya.
- c. Dana pengurus.
- d. Dana pegawai atau karyawan.
- e. Dana pendidikan koperasi.
- f. Dana pembangunan daerah kerja.

Sisa Hasil Usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota SHU yang berasal dari usaha koperasi akan dibagi secara tepat dan adil kepada masing-masing yang berhak menerimanya. Cara dan besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha telah diatur dalam Anggaran Dasar, begitu juga penggunaannya kecuali cadangan koperasi.

II.1.4. Modal Koperasi

Modal merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting didalam mengelola dan menggerakkan sebuah koperasi sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai alas perekonomian rakyat.

Usaha koperasi dilaksanakan secara bertahap dalam ruang lingkupnya, sejak didirikan dalam ukuran kecil terus berkembang terarah kepada wujud usaha besar. Usaha yang membesar ini membutuhkan dukungan modal kerja. Apakah menggunakan modal pemilik (sendiri) atau menggunakan modal dari luar. Pertimbangan yang diminta disini adalah antara kecukupan modal milik atau sendiri dengan pengambilan modal dari luar, manakala usaha koperasi meningkat dan keperluan modal kerja yang meningkat pula.

Pengembangan koperasi yang semula kecil kemudian (cepat atau lambat) menjadi besar, menghendaki investasi atau penanaman modal dalam aktiva tetap, sekalipun secara teori bisa dipenuhi dengan modal pemilik.

Koperasi sebagai suatu badan usaha menarik atau memasukkan modal dari luar tercermin dalam permodalannya, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Serta menarik pula dari luar atau calon anggota simpanan pokok serentak menjadi anggota dan sementara koperasi menarik pula simpanan wajib dari anggotanya. Modal koperasi terdiri dari, modal sendiri atau modal pemilik dan modal dari luar atau modal asing/pinjaman.

Modal sendiri antara lain :

a. Simpanan Pokok.

Adalah modal yang berasal dari simpanan yang dibayar pada waktu masuk jadi anggota boleh dicicil atau dibayar sekaligus. Simpanan ini boleh diambil kembali jika keluar dari anggota.

b. Simpanan Wajib.

Adalah modal yang berasal dari simpanan wajib yang dibayar terus menerus secara teratur, baik jumlah ataupun masa pembayarannya. Biasanya simpanan wajib boleh diambil bila keluar sebagai anggota.

c. Dana Cadangan.

Adalah modal yang berasal dari sisa hasil usaha yang ditetapkan oleh anggaran dasar koperasi sebagai dana cadangan tiap-tiap satu periode per tahun.

d. Hibah.

Adalah modal yang diterima secara cuma-cuma dari pihak lain menjadi modal sendiri.

Sedangkan modal dari luar atau asing berasal dari

a. Pinjaman Anggota.

Adalah modal yang berasal dari pinjaman-pinjaman yang diberikan anggota baik itu berupa barang maupun uang tunai

b. Koperasi Lainnya.

Adalah modal yang diambil dari dana pinjaman koperasi lainnya ataupun anggota dari koperasi tersebut.

c. Bank dan Lembaga keuangan lainnya.

Adalah modal yang berasal dari pinjaman perbankan, apakah itu Bank pasar atau Bank umum, Bank swasta ataupun Bank-bank Pemerintah.

d. Penerbitan surat-surat obligasi dan Surat hutang lainnya.

Adalah hutang yang berasal dari penerbitan surat-surat obligasi dan surat-surat hutang lainnya yang dikeluarkan untuk pasar pihak-pihak lainnya.

Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, (28:1999) didalam bukunya yang berjudul "MODAL KOPERASI" mengungkapkan bahwa modal yang ada dalam koperasi terdiri atas :

1. Modal Aktif.

Sebagai modal usaha, koperasi akan mempunyai

- a. Modal Lancar yang berupa uang tunai, simpanan. di Bank, persediaan-persediaan barang, piutang atau tagihan-tagihan persediaan bahan, persediaan barang dalam pengolahan barang yang kesemuanya merupakan modal besar dan diarahkan untuk menciptakan pendapatan.

- b. Modal Tetap, berupa benda-benda, tetap dalam tanah, gedung, gudang peralatan dan inventaris lainnya yang mendorong Koperasi berusaha sehari-hari menciptakan produk atau jasanya untuk dijual kepada anggota dan umum sebagai konsumen.

2. Modal Pasif.

Yaitu nilai-nilai modal yang diperoleh Koperasi baik dari para anggota maupun dari bukan anggota, yang menggambarkan sumber modal yang diperjanjikan sebagaimana dengan para pemilik asalnya yang dapat kita kategorikan seperti berikut

- a. Utang Jangka Pendek.
 - Simpanan sukarela dalam bentuk Giro yang harus dikembalikan sewaktu-waktu diminta oleh penyimpan yang bersangkutan.
 - Biaya-biaya yang belum dibayar, seperti biaya-biaya yang sudah waktunya dibayar, tetapi belum sempat dibayarkan kepada yang bersangkutan. Pajak yang terutang yang merupakan pajak sudah diperhitungkan jumlahnya, tetapi belum sempat dibayar.
 - Dana-dana lain yang atau sudah dekat waktu penyerahan penggunaannya sudah kurang dari satu tahun.
- b. Utang Jangka Panjang.
 - Simpanan wajib, karena ditentukan oleh peraturan akan dapat dibayar / dikembalikan bila diminta oleh yang bersangkutan bila waktu yang diperjanjikan sudah habis, sekalipun Simpanan itu diterima dari anggota.

- Simpanan sukarela yang dibentuk Deposito berjangka, mengingat harus dikembalikan kepada penyimpan bila jangka waktu penyimpanannya telah habis.
- Dana-dana lain yang masih lama jangka waktu pengembalian atau waktu penggunaannya, umpamanya lebih lama dari satu tahun.

c. Modal (sendiri) Koperasi

- Simpanan pokok sebagai penyertaan tiap anggota dalam pemilikan koperasi sampai memperoleh suara sama banyaknya diantara sesama anggota.
- Cadangan, penyisihan dari Sisa Hasil Usaha Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian yang diderita Koperasi.
- Sisa Hasil Usaha (Koperasi) selama belum ada penetapan pembagian oleh rapat anggota.

II.1.5. Anggota Koperasi

Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi itu sendiri.

Anggota Koperasi mempunyai hak dalam mengelola dan mengurus Koperasi selama anggota tersebut mampu dan disahkan sebagai pengurus Koperasi. Selain hak Setiap anggota, Koperasi dibebankan

sebuah kewajiban yang mana hak dan kewajiban terhadap Koperasi telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Hak dan kewajiban anggota tertuang dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No, 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yaitu Ayat (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Ayat (2) Setiap anggota mempunyai hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Keberadaan anggota dan kecukupan modal akan lebih baik dan menguntungkan apabila didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari:

1. Rapat Anggota.

Rapat Anggota Koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan selama sekali dalam setahun. Rapat Anggota atau istilah lainnya RAT secara normal diselenggarakan sekali dalam satu tahun atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan.

Beberapa ketentuan mengenai Rapat Anggota :

- a. Setiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.
- b. Rapat Anggota sah apabila memenuhi forum yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Anggota.
- c. Jika Rapat Anggota tidak berlangsung, rapat di tunda untuk waktu tertentu.
- d. Apabila keadaan mengharuskan diadakan rapat anggota, maka koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa.
- e. Keputusan Rapat Anggota di ambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Didalam Rapat Anggota pengambilan keputusan di ambil secara musyawarah dan mufakat. Pemungutan suara, terbanyak hanya dilakukan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai hak:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Memilih Pengurus dan Pengawas.
- c. Mensyahkan Laporan Pertanggung Jawaban pengurus.
- d. Menetapkan kebijaksanaan yang diyakinkan oleh pengurus.

Rapat Anggota yang berlangsung paling sedikit sekali setahun, harus memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengemukakan berbagai usul yang bersifat membangun.

1. Badan pengurus.

Pengurus koperasi memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama koperasi, serta melakukan kegiatan sesuai dengan keputusan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Pengurus koperasi mempunyai kedudukan yang menentukan berhasil tidaknya usaha yang di jalankan.

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota. Pengurus merupakan wakil dari para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota.

Susunan Pengurus sebuah koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
- b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian.
- c. Mampu mengelola koperasi berikut usahanya.
- d. Mempunyai keberanian saat pengambilan keputusan.

Pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang yang tertulis di dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.

- b. Memajukan rancangan rencana kerja serta rancangan-rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan periodik, perlu diadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan guna melaksanakan rencana koperasi yang di tetapkan rapat tahun anggota. Ketua pengurus merencanakan rapat hingga waktunya dapat di sesuaikan dengan kondisi setempat.

Selanjutnya, masih menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disediakan beberapa hal yang menjadi prinsip koperasi, antara lain:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoprasian kerjasama antar koperasi

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda

maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (www.home.unpar.ac.id).

Jenis-jenis yang di kenal di dalam perkoperasian di Indonesia, antara lain: Induk Koperasi, Koperasi Primer, Koperasi Sekunder, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Pasar (KOPPAS), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi Pegawai (KOPPEG), Koperasi Warga (KOPAG), Koperasi Mahasiswa (KOPMA). Namun secara umum kperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu:

- Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Produsen
- Koperasi Pemasaran
- Koperasi Jasa

Menurut Titik Sartika Partomo (2002: 107) dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Skala kecil/menengah & Koperasi menerangkan bahwa secara khusus koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana :

1. Untuk memperbaiki situasi ekonomi
2. Meningkatkan sumber daya modal kepada pembentukan simpan pinjam
3. Memberikan konstribusi atas kegiatan-kegiatan ekonomi
4. Meningkatkan pendapatan nasional
5. Memperbaiki kondisi social

Menurut Pandji Anoraga (1999 : 69) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Koperasi mengungkapkan bahwa : Pengurus Koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan harus menekankan keputusan rapat anggota. Pengurus harus menekankan kewirakoperasian ialah kualitas pribadi masing-masing yang merupakan kekuatan untuk mendorong perkembangan berdasarkan kerja sama untuk kepentingan bersama.

2. Pengawas (Badan Pemeriksa)

Agar usaha koperasi berjalan dan berhasil dengan baik, maka setiap langkah harus diikuti dengan kontrol terhadap semua kegiatan Koperasi baik itu secara intern maupun ekstern, tanpa adanya kontrol maka berbagai macam penyelewengan akan mudah terjadi oleh karena itu setiap koperasi diperlukan adanya suatu Badan Pengawas atau yang disebut sebagai Badan Pemeriksa.

Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota didalam Rapat Anggota serta, bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengawas ialah mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Anggota pengawas dipilih untuk jabatan tertentu, anggota pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Dalam sebuah Koperasi pengawasan adalah bagian dari tugas manajemen. Tujuan pengawasan adalah untuk mendidik, membimbing supaya lebih teliti dan ahli dalam mengelola koperasi

sehingga koperasi menjadi berkembang dan maju. Untuk menjadikan Koperasi sebagai koperasi yang mantap pengawasan mutlak diperlukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tugas-tugas dari sebuah Badan Pemeriksa adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka badan pemeriksa berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi setiap mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Badan pemeriksa ini sejajar kedudukannya dengan pengurus dan wajib merahasiakan segala hasil pemeriksaan pada pihak ketiga.

Berikut ini disajikan logo gerakan koperasi Indonesia disertai penjelasan tentang makna yang terkandung di dalamnya.

Gambar 1.1. Logo Gerakan Koperasi Indonesia



Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut: 1) Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh; 2) Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus; 3) Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi;

4) Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi; 5) Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi; 6) Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar; 7) Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia; 8) Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.

II.2 Teori Keseimbangan Usaha Koperasi

Sebagai salah satu dari badan usaha dalam sistem perekonomian Indonesia, tujuan dari koperasi sama dengan badan usaha yang lain. Penjualan maksimal merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh koperasi. Sudarsono (1999: 378) mengemukakan syarat primer yang diperlukan untuk pertumbuhan koperasi adalah pertumbuhan penjualan. Sehingga wajar jika koperasi menetapkan tujuan adalah penjualan yang maksimal. Salah satu daya tarik orang bergabung dalam koperasi adalah keuntungan Skala (*economies of scale*) yang tidak mungkin diperoleh jika masing-masing anggota berusaha sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan skala ekonomi yaitu dengan meningkatkan jumlah transaksi (untuk jenis usaha perdagangan dan jasa keuangan). Hal ini sesuai dengan fungsi tujuan sebagai berikut :

$$Y = H \times Q$$

$$Y = \text{Pendapatan}$$

$$H = \text{Harga}$$

$$Q = \text{Jumlah transaksi}$$

Dari fungsi diatas dapat disimpulkan untuk meningkatkan pendapatan (Y) maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama menaikkan harga (H) dan yang kedua meningkatkan jumlah transaksi (Q). Namun untuk menaikkan harga sangat riskan karena konsumen koperasi adalah juga anggota koperasi. Sehingga kemungkinan yang lebih realistis adalah menambah jumlah transaksi dari unit-unit usaha.

Selain itu Soetrisno dalam Tulus Tambunan (2007: 102) menyatakan model-model keberhasilan koperasi di dunia umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti di Perancis dan Belanda dan produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika, khususnya AS dan di beberapa negara di Eropa. Dari evaluasinya, Soetrisno melihat ada beberapa syarat agar koperasi bisa maju, yakni:

- a. Skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi;
- b. Koperasi harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi *platform* dasar menumbuhkan koperasi;
- c. Posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema *bilateral monopoly* menjadi akan memperkuat posisi tawar koperasi;
- d. Pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM).

II.3 Koperasi menurut syari'at islam

Koperasi disebut juga Syirkah Ta'awuniyah (perseroan tolong menolong), dikaji dari segi devenirsinya koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara', karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan, dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan. Maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Didalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 2 Allah swt berfirman:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar

19

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an diatas, kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah swt, maka koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (haqa tuqatih).

Didalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik R.A. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : Tolonglah saudaramu yang menganiaya, aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya ; ya Rasulullah, aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong orang yang menganiaya? Rasulullah menjawab; Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya. (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad)

Hadist tersebut dipahami lebih jauh (luas) maka dapat dipahami bahwa umat islam dianjurkan untuk tolong menolong orang - orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang - orang kaya jangan sampai menghisap darah orang - orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan dengan cara lainnya.

Tolong menolong adalah perbuatan terpuji menurut undang – undang islam, salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi adalah merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut undang – undang islam.

II.4. Teori Pendapatan

Dalam teori ekonomi makro Sadono Sukirno, (2008: 133) terdapat teori pendapatan. Salah satu teori tersebut adalah teori keseimbangan dua sektor. Teori ini dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

dengan syarat $S = I$

dimana : Y = pendapatan, C = konsumsi, S = tabungan, I = investasi.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan sebanding dengan besarnya konsumsi dan investasi. Jika diterapkan dalam koperasi maka pendapatan koperasi akan sebanding dengan konsumsi dan investasi yang dilakukan koperasi itu. Dalam hal ini konsumsi dapat berupa konsumsi anggota-anggotanya. Demikian juga investasi yang terjadi juga berasal dari anggota koperasi itu sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan berasal dari pihak ketiga. Jadi untuk meningkatkan pendapatan koperasi maka perlu ditingkatkan tingkat konsumsi anggota-anggota koperasi dan meningkatkan besarnya investasi.

Menurut Titik Sartika Partomo (2002: 84) menerangkan bahwa Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi

dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 dapat dirumuskan sebagai :

Sisa hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban lain + Pajak). Karena komponen – komponen yang berada didalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya, maka rumusan diatas dapat disederhanakan menjadi : (Titik Sartika Partomo, 2002: 84)

$$SHU = TR - TC$$

Keterangan SHU = Sisa Hasil Usaha / Pendapatan

TR = Total Revenue (pendapatan keseluruhan dalam satu tahun)

TC = Total Cost (biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun)

Menurut Samuelson, (1999: 98) sebuah perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba akan menetapkan tingkat produksinya ketika biaya marginal sama dengan harga ($MC = P$). Namun pada badan usaha koperasi hal ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Karena koperasi bisa lebih banyak dari perusahaan lainnya (*Nonkoperasi*) pada tingkat harga yang sama, karena para anggota koperasi lebih mengutamakan membeli barang di koperasi daripada di pasar bebas. Lagi pula, koperasi pada dasarnya adalah organisasi yang berorientasi pada pelayanan anggota, bukan organisasi yang mencari laba semata-mata.

II.5 Analisis Kelayakan Usaha

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha diukur melalui perhitungan *Net Present Value (NPV)*, *Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)*, dan *Internal Rate of Return (IRR)*. (Kasmir,2007;54).

1). *Net Present Value* (NPV)

Digunakan untuk melihat manfaat investasi dengan ukuran nilai kini (present value) dari keuntungan bersih proyek. NPV didefinisikan sebagai nilai dari proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. NPV yang dianggap layak adalah NPV yang bernilai positif. NPV bernilai positif mengindikasikan cash flow yang dihasilkan melebihi jumlah yang diinvestasikan.

2). *Internal Rate of Return* (IRR)

Merupakan suku bunga maksimal (discount rate) untuk sampai pada NPV bernilai sama dengan nol (seimbang). IRR (Tingkat Pengembalian Internal) didefinisikan sebagai tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan suatu proyek yang diukur dengan membandingkan cash flow yang dihasilkan proyek dengan investasi yang dikeluarkan untuk proyek tersebut. Untuk dapat digunakan sebagai analisis pembandingan dalam keputusan investasi maka nilai IRR harus dibandingkan dengan nilai perhitungan Minimal Attractive Rate of Return (MARR). MARR merupakan suatu tingkat pengembalian tertentu yang diperoleh relatif tanpa risiko misalnya dengan membandingkan tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan melalui deposito.

3). *Net Benevit Cost* (Net B/C)

Merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari keuntungan bersih yang positif dengan nilai sekarang dari keuntungan bersih yang negatif. Analisis

manfaat-biaya merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan/kerugian serta kelayakan suatu proyek. Dalam perhitungannya, analisis ini memperhitungkan biaya serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program. Dalam analisis benefit dan cost perhitungan manfaat serta biaya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Analisis ini mempunyai banyak bidang penerapan. Salah satu bidang penerapan yang umum menggunakan rasio ini adalah dalam bidang investasi. Sesuai dengan makna tekstualnya yaitu benefit cost (manfaat-biaya) maka analisis ini mempunyai penekanan dalam perhitungan tingkat keuntungan/kerugian suatu program atau suatu rencana dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai. Penerapan analisis ini banyak digunakan oleh para investor dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan hal ini maka analisis manfaat dan biaya dalam pengembangan investasi hanya didasarkan pada rasio tingkat keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan atau dalam kata lain penekanan yang digunakan adalah pada rasio finansial atau keuangan.

Dibandingkan penerapannya dalam bidang investasi, penerapan Benefit Cost Ratio (BCR) telah banyak mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan analisis BCR antara lain yaitu penerapannya dalam bidang pengembangan ekonomi daerah. Dalam bidang pengembangan ekonomi daerah, analisis ini umum digunakan pemerintah daerah untuk menentukan kelayakan pengembangan suatu proyek.

Relatif berbeda dengan penerapan BCR di bidang investasi, penerapan BCR dalam proses pemilihan suatu proyek terkait upaya pengembangan ekonomi daerah relatif lebih sulit. Hal ini dikarenakan aplikasi BCR dalam sektor publik harus mempertimbangkan beberapa aspek terkait social benefit (social welfare function) dan lingkungan serta tak kalah penting adalah faktor efisiensi. Faktor efisiensi mutlak menjadi perhatian menimbang terbatasnya dana dan kemampuan pemerintah daerah sendiri.

Secara terinci aspek-aspek tersebut juga mempertimbangkan dampak penerapan suatu program dalam masyarakat baik secara langsung (direct impact) maupun tidak langsung (indirect impact), faktor eksternalitas, ketidakpastian (uncertainty), risiko (risk) serta shadow price. Terkait perhitungan risiko dan ketidakpastian, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan asuransi dan melakukan lindung nilai (hedging).

Efisiensi ekonomi merupakan kontribusi murni suatu program dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga yang menjadi perhatian utama dalam penerapan BCR dalam suatu proyek pemerintah yang berkaitan dengan sektor publik adalah redistribusi sumber daya.

Manfaat Analisis Benefit Cost Ratio

Terkait dengan penerapan BCR dalam perekonomian suatu daerah, maka sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja, pemerintah harus menentukan target kinerja. Target tersebut ditetapkan berdasarkan prioritas tertentu. Dalam hal ini, BCR tidak hanya membantu pengambil kebijakan untuk

memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada, yang dalam hal ini pemilihan alternatif terbaik dilakukan berdasarkan alasan perbandingan antara life cycle's benefit dengan biaya yang dikeluarkan, melainkan juga dapat membandingkan alternatif-alternatif tersebut.

Analisis BCR masih dapat diterapkan ketika suatu proyek telah diputuskan untuk dilakukan, sehingga manfaat yang kedua dari dilakukannya analisis BCR adalah dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan.

Manfaat ketiga dari penerapan BCR adalah BCR dapat digunakan untuk evaluasi suatu proyek yang telah selesai dikerjakan. Tujuan dilakukannya evaluasi ini adalah untuk mengetahui kinerja suatu proyek dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat digunakan untuk perbaikan program yang selanjutnya.

4). *Break Event Point* (BEP)

Dilakukan untuk mengetahui kapan keuntungan mulai diperoleh. BEP ini dilakukan dengan dua cara yaitu : (1). Atas dasar nilai jual dalam rupiah dan (2). Atas produksi.

a. BEP atas dasar nilai jual :
$$BEP_{(Rp)} = \frac{FC}{\frac{VC}{1-S}}$$

b. BEP atas dasar produksi

$$Q_{BEP} = \frac{TFC}{(P-AVC)}$$

dimana :

TFC = Biaya tetap (Rp)

AVC = Biaya tidak tetap (Rp)

C = Produksi (Kg)

P = Unit penjualan (Rp)

S = Penjualan total (Rp)

II.6 HIPOTESIS

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka diatas, penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut :

”Diduga usaha KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu memiliki prospek usaha yang baik dimasa yang akan datang.

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Gemah Ripah yang berada di Rimbajaya Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh dari wawancara dengan ketua tentang kebijakan KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu dalam meraih pendapatan dan SHU setiap periode.

2. Data Sekunder.

Yaitu data yang langsung dari pihak koperasi, dalam hal ini manajer keuangan koperasi berupa laporan keuangan koperasi (neraca dan laporan laba rugi), sedangkan data lainnya berupa sejarah berdirinya koperasi dan struktur organisasi.

III.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode:

1. Observasi dan Dokumentasi

Penulis terjun langsung kelapangan untuk mengetahui dan mengumpulkan data tambahan dari arsip yang dimiliki oleh koperasi. Seperti laporan keuangan, sejarah berdirinya koperasi, kegiatan usaha koperasi, struktur koperasi, pendapatan koperasi dan penggunaan biaya.

2. Interview

Penulis menanyakan langsung hal yang berhubungan dengan penjualan pemakaian asset dan modal koperasi bagian keuangan KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu.

III.4 Analisi Data

Dalam menganalisa data yang dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan kemudian ditabulasikan dalam tabel dan selanjutnya diuraikan sehingga menghasilkan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang sebenarnya serta mengaitkan data dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Adapun indikator yang ingin dilihat adalah :

- Kondisi KUD
- Pengembangan usaha
 - Investasi
 - Biaya operasional

- Pendapatan
- Analisis kelayakan usaha
 - *Net Present Value (NPV)* dari arus *benefit* dan biaya

Yaitu selisih antara *present value* dari *benefit* dan *present value* dari biaya, dengan rumus :

$$NPV = PVTB - PVTC$$

Dimana :

PVTB : merupakan present value total benefit

PVTC : merupakan present value total cost

Kriteria ini dikatakan layak apabila $NPV > 0$, jika $NPV = 0$, berarti proyek tersebut mengembalikan persis *opportunity of capital*. Jika < 0 , proyek ditolak.

- *Net Benefit Cost*

$$\text{net B/C} = \frac{PVNB(+)}{PVNB(-)}$$

Jika $\text{net B/C} > 1$ proyek layak

Jika $\text{net B/C} < 1$ proyek tidak layak

- *Internal Rate Return*

$$IRR = DF_1 + (DF_2 - DF_1) \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2}$$

Jika $IRR > \text{discount rate}$, proyek layak

Jika $IRR < \text{discount rate}$ proyek tidak layak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu

KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tahun 1992 yang diresmikan dan disahkan oleh kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Riau. Masyarakat yang dapat menjadi anggota koperasi adalah terdiri dari bapakbapak yang menjadi anggota kelompok tarsi dan ibu-ibu PKK atau juga masyarakat yang baru pindah dari suatu daerah, masyarakat yang baru pindah dapat menjadi anggota koperasi asalkan dapat memenuhi syarat dan kewajiban seperti membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela setiap bulannya.

Dalam melaksanakan usahanya KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu mengangkat sejumlah karyawan untuk mengarahkan usaha dalam hal untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Jika dilihat dari tujuan KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu secara umum adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Mengembangkan kemampuan usaha para anggotanya.

B. Struktur organisasi

Organisasi adalah bentuk sebuah perserikatan orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Untuk berdirinya sebuah organisasi diperlukan 3 faktor pendukung yaitu:

1. Adanya sekelompok orang
2. Adanya hubungan dan pembagian kerja diantara orang-orang
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Menurut Prayudi Atmosudiryo, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Beliau menekankan pada pembagian kerja dan struktur. Sehingga dari pengertian tersebut terdapat ciri-ciri sebuah organisasi yaitu:

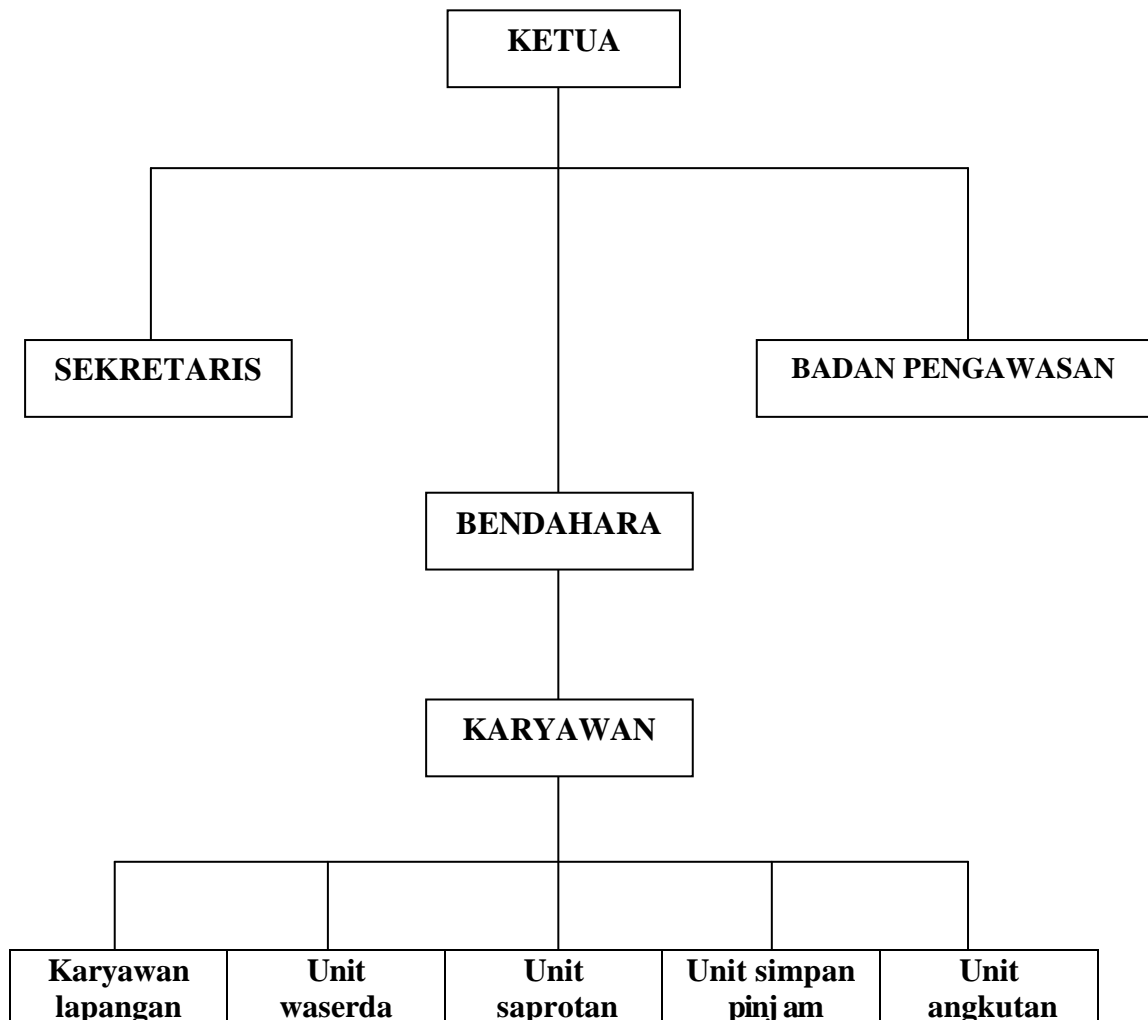
- a. Adanya sekelompok orang-orang untuk bekerja sama
- b. Adanya sebuah pola hubungan kerja antar kelompok
- c. Kerja sama yang didasarkan oleh hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang dalam mencapai tujuan.

Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat yang efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan mencapai tujuan-tujuan oleh organisasi dengan biaya minimum.

Sehingga apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing dapat terlaksana dan para anggotanya dapat mengetahui apa yang menjadi tujuannya. Sehingga masing-masing bagian dapat dikoordinir ke satu arah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan demikian bahwa struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian terdapat dalam suatu organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI

KUD GEMAH RIPAH KABUPATEN ROKAN HULU



Sumber: KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu 2010.

Melihat struktur organisasi KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu dapat diuraikan tugas dan wewenang masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuatan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

- b. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan badan pemeriksa dan pengurus.
- d. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi serta kebijakan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengurusan.

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Pengurus ini terdiri dari ketua, sekretaris , dan bendahara.

- a. Ketua bertugas mengkoordinir dan membina seluruh karyawan atau pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari . ketua harus mampu mengelola usaha-usaha yang dibawah lingkungan yang meliputi penentuan,atau pengarahan, dan pengamatan seluruh kegiatan.
- b. Sekretaris bertanggung jawab dalam pencatatan laporan-laporan perkembangan koperasi yaitu mengenai pelaksanaan administrasi secara teratur antara lain: misalnya membuat laporan tentang daftar anggota, daftar pengurus, daftar badan pemeriksa, notulen rapat, keputusan

rapat, anjuran pejabat, anjuran dari instansi lain, saran- antara lain: perencanaan, penyelarasan, pengorganisasian, saran anggota, saran dan badan pemeriksa, kejadian penting, simpan dan pinjaman anggota dan lain sebagainya yang memperlancar administrasi untuk kemajuan koperasi.

- c. Bendahara bertanggung jawab atas segala laporan keuangan koperasi yang meliputi pinjaman anggota dan dana-dana koperasi yang tergolong penerimaan dan pengeluaran.
- d. Badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengurus bertugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Pengurus bertanggungjawab:

- 1. Bertanggung jawab secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas kerugian KUD yang disebabkan antara lain:

- a. Kebijakan yang dilakukan pengurus atas kebijaksanaan yang diambil dalam rapat pengurus, maka semua pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita KUD tersebut.
 - b. Kegiatan yang dilakukan atas tindakan seorang pengurus atau oleh beberapa orang anggota pengurus yang bersangkutan yang menanggung kerugian tersebut.
 - c. Seorang anggota atau beberapa anggota pengurus bebas dari menanggung kerugian bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya atau yang bersangkutan telah berusaha untuk mencegah kerugian tersebut.
2. Pengurus lama yang habis masa jabatannya tidak terpilih lagi baik seluruh atau sebagian harus melakukan serah terima lengkap dengan data fisik seperti bukubuku organisasi, laporan keuangan serta administrasi pembukuan, serta laporan keuangan serta administrasi pembukuan, uang kas dan surat-surat serta barang inventaris dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban serah terima tersebut.
 3. Hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama yang belum lunas, menjadi tanggung jawab pengurus baru sepanjang tidak bermasalah oleh pengurus lama baik secara mandiri maupun seluruh pengurus lama.
 4. Dalam hal seorang atau beberapa orang atau semua anggota pengurus yang oleh keputusan pengadilan yang dinyatakan bermasalah karena tindakan pidana atau perdata akibat tindakan terhadap KUD sebagai badan hukum atau pihak lain, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan tanggung

jawab.

3. Pengawasan

Badan pengawasan adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.

Pengawasan bertugas: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi.

Pengawas berwenang : Untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.

Pengawas bertanggung jawab: Mengawasi kebijakan-kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pengurus apakah kebijakan atau tindakan tersebut sesuai dengan rapat anggota tahunan dan anggaran dasar koperasi.

C. Aktivitas KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu

KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu merupakan KUD yang menyelenggarakan lebih dari satu macam usaha atau lebih dari satu kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi ini tidak dibentuk untuk sekaligus melakukan bermacam-macam usaha, melainkan dalam perkembangannya karena usaha yang ditekuni makin prospektif dan ia makin kuat maka ia juga meraih peluang usaha lain diluar bidang yang semula ditekuninya.

1. Unit Usaha Waserda Atau Sembako

Unit usaha waserda adalah usaha yang dilakukan untuk pemenuhan

kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Seperti beras, gula, garam, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.

2. Unit Usaha Jasa Angkutan TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit.

Unit usaha yang dilakukan dalam menyediakan jasa angkutan dan sewa kendaraan. jasa angkutan ini adalah untuk mengangkut buah kepala sawit dari lokasi perkebunan warga ketempat penjualan kepala sawit atau pabrik. Jasa angkutan ini biasanya dibutuhkan oleh warga setiap bulannya 2- 3 kali dalam setiap bulannya untuk mengangkut hasil panen. Sistem pembayaran jasa angkutan ini di berikan setelah warga menerima gaji yang pabrik pada awal bulan melalui KUD.

3. Unit Usaha Simpan Pinjam atau kredit.

Usaha simpan pinjam atau kredit berfungsi untuk menyediakan modal bagi anggota yang membutuhkan dana untuk usaha.

4. Unit usaha pupuk dan saptoran (sarana produksi pertanian)

Usaha pupuk dan saptoran adalah usaha KUD dalam menyediakan pupuk dan sarana penunjang pertanian. Tujuan usaha ini adalah untuk menyediakan kebutuhan para anggota koperasi agar hasil pertaniannya berjalan sesuai dengan yang diinginkan dalam peningkatan hasil usahanya. Usaha yang diperlukan hal yang menyediakan pupuk seperti pupuk urea, Kcl, Tsp dan juga menyediakan produksi pertanian menyediakan bibit seperti bibit kelapa sawit, bibit kacang panjang, jagung, dan mentimun.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Hasil Penelitian

1. Profil KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu

Koperasi Unit Desa (KUD) Gemah Ripah yang berada di Desa Rimbajaya Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, koperasi ini didaftarkan di dalam departemen koperasi dan PPK Propinsi Riau dengan badan hukum No. 272 / BH / PAD / KD / 4/1 / VI / 2000, NPWP No.01.508.169.8.

KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu merupakan KUD yang menyelenggarakan lebih dari satu macam usaha atau lebih dari satu kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi ini tidak dibentuk untuk sekaligus melakukan bermacam-macam usaha, melainkan dalam perkembangannya karena usaha yang ditekuni makin prospektif dan ia makin kuat maka ia juga meraih peluang usaha lain diluar bidang yang semula ditekuninya.

2. Pengembangan Skala Usaha

Untuk mengetahui apakah KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu ini mempunyai prospek yang baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan menilai apakah usaha yang didirikan mendapat keuntungan (layak atau tidak layak untuk dilaksanakan) maka salah satu perhitungan yang lazim digunakan adalah *Net Present Value (NPV)*, *Nilai Net Benefit Ratio* dan *Internal Rate Of Return (IRR)*. Sebelum menilai layak atau tidaknya usaha ini ada unsur yang harus diketengahkan sehubungan dengan perhitungan yang akan dilaksanakan

dalam mencari nilai-nilai diatas yaitu : biaya investasi, biaya operasional dan pendapatan pengusaha.

a. Investasi

Investasi yang dikeluarkan oleh KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pendirian usaha ini adalah biaya sewa ruko, pengadaan peralatan dan perlengkapan KUD yang digunakan untuk menjalankan usaha nantinya.

Biaya yang dikeluarkan untuk investasi adalah sebesar Rp. 26.650.000.-. Ini Digunakan Untuk Keperluan Mengontrak Ruko, Peralatan Usaha Seperti, timbangan, pompa minyak, rak etalase, timbangan kav, dan drum minyak, kemudian perlengkapan usaha seperti meja, mesin ketik, kursi, meja tulis, computer, lemari, printer dan meja computer.

Adapun rincian biaya investasi pada KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. IV. I Investasi KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu

1	Kontrak Ruko	7,500,000
2	Biaya Peralatan Usaha	
	- Timbangan 2kg	85,000
	- Pompa Minyak 1 buah	25,000
	- Rak Etalase	924,000
	- Timbangan Kav 50 kg	100,000
	- Drum Minyak	1,350,000
	Jumlah	2,484,000
3	Biaya Peralatan Usaha	
	- Meja 1/2 biro 5 buah	1,850,000
	- Mesin ketik	1,600,000
	- Kursi 6 buah	661,000
	- Meja tulis	625,000
	- Computer 2 unit	9,160,000
	- Lemari	1,467,000
	- Printer	953,000
	- Meja Komputer	350,000
	Jumlah	16,566,000
	Total biaya	26,650,000

Sumber : Data Olahan

b. Biaya Operasional

1. Biaya Tetap (Fixed Cost)

Besar kecilnya biaya tetap untuk masing-masing pemilik berbeda-beda. Perbedaan dalam pengeluaran biaya oleh masing-masing pemilik usaha disebabkan oleh pengeluaran yang berbeda-beda untuk biaya peralatan.

Adapun yang menjadi biaya tetap adalah biaya gaji karyawan, biaya penyusutan peralatan usaha dan biaya transport. Untuk secara jelasnya biaya tetap dapat dilihat pada table berikut ini :

Table IV. 2 Biaya Tetap

No	Rincian	Biaya
1	Biaya Gaji karyawan	7,400,000
2	Biaya Penyusutan Peralatan Usaha	222,000
3	Biaya Transport Usaha	3,250,000
	Total Biaya Tetap	10,872,000

Sumber : Data Olahan

Biaya tetap KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu adalah terdiri dari biaya gaji karyawan, biaya penyusutan peralatan, dan biaya transportasi. Biaya operasional KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar Rp. 10.872.000.

2. Biaya Tidak Tetap (Variabel cost)

Biaya tidak tetap yang dikeluarkan KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu meliputi biaya koran, listrik, ATK, angsuran kendaraan, telpon, konsumsi, penyediaan peralatan kantor, biaya kebersihan dan lembur. Untuk lebih jelasnya dilihat pada table berikut ini :

Table V.3 Biaya tidak tetap

No	Rincian	Biaya
1	Biaya Koran	150,000
2	Listrik	648,000
3	ATK	1,750,000
4	Sewa Kendaraan	2,850,000
5	Telp	550,000
6	Konsumsi	2,730,500
7	Penyediaan peralatan kantor	2,625,000
8	Biaya kebersihan	556,000
9	Lembur	1,768,500
	Total	13,628,000

Sumber : Data Olahan

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa biaya tidak tetap yang digunakan KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 13.628.000,

Untuk menghitung rata-rata biaya total cost dapat digunakan rumus :

$$TC = TFC + TVC$$

Berdasarkan rumus diatas, dan data yang telah dipaparkan, maka dapat dihitung total cost untuk KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu, dimana dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V. 4. Total Cost

No	Rincian	Jumlah
1	Biaya Tetap	10,872,000
2	Biaya tidak tetap	13,628,000
	Total Biaya Tetap	24,500,000

Sumber : Data Olahan

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa total cost setelah biaya tetap ditambah dengan total biaya tidak tetap maka jumlah keseluruhannya adalah Rp. 24.500.000.

c. Pendapatan Usaha

Pendapatan yang diterima Koperasi Unit Desa Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 40,814,600,- ini diperoleh dari penjualan waserda dan pendapatan jasa serta pendapatan lain-lain. Dimana penjualan waserta menghasilkan Rp. Rp. 20,407,300,- kemudian pendapatan jasa sebesar Rp. 6.728.000,- pendapatan jasa TBS sebesar Rp. 7.943.000,- dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 5.736.300,

3. Analisis Pengembangan Skala Usaha

a. Nilai NPV (*Net Present Value*)

Digunakan untuk melihat manfaat investasi dengan ukuran nilai kini (present value) dari keuntungan bersih proyek. NPV didefinisikan sebagai nilai dari

proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. NPV yang dianggap layak adalah NPV yang bernilai positif. NPV bernilai positif mengindikasikan cash flow yang dihasilkan melebihi jumlah yang diinvestasikan.

Keuntungan bersih suatu usaha adalah pendapatan yang diterima dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha yang dimilikinya. maka nilai NPV suatu usaha adalah present value dari arus benefit dikurangi dengan present value arus biaya (PV Benefit - PV Cost).

NPV merupakan selisih antara value dari *benefit* dan *present value*, yaitu dengan cara menjumlahkan total PV cost dan PV benefit dengan discount rate pada penelitian ini sebesar 12%, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=0}^n \frac{A_t}{(1+r)^t}$$

$$NPV = -122.500.000 = \frac{40.814.600}{(1+0.12)^1} + \frac{40.814.600}{(1+0.12)^2} + \frac{40.814.600}{(1+0.12)^3} + \frac{40.814.600}{(1+0.12)^4} + \frac{40.814.600}{(1+0.12)^5}$$

$$NPV = -122.500.000 + 40.814.600 (3.6048)$$

$$NPV = -122.500.000 + 147.128.470 = 24.628.470$$

Pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek investasi diterima atau ditolak, jika menggunakan metode *net present value (NPV)*, kita membandingkan nilai NPV tersebut dengan nilai nol. Jika $NPV > 0$, maka rencana investasi layak diterima sebaliknya apabila $NPV < 0$ atau negative, maka rencana investasi ditolak atau tidak layak. Berdasarkan hasil perhitungan NPV diperoleh angka 24.628.470, ini berarti $NPV > 0$, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak, karena nilai $NPV > 0$.

b. Nilai Net B/C ratio

Merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari keuntungan bersih yang positif dengan nilai sekarang dari keuntungan bersih yang negatif. Analisis manfaat-biaya merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan/kerugian serta kelayakan suatu proyek. Dalam perhitungannya, analisis ini memperhitungkan biaya serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program. Dalam analisis benefit dan cost perhitungan manfaat serta biaya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Analisis ini mempunyai banyak bidang penerapan. Salah satu bidang penerapan yang umum menggunakan rasio ini adalah dalam bidang investasi. Sesuai dengan makna tekstualnya yaitu *benefit cost* (manfaat-biaya) maka analisis ini mempunyai penekanan dalam perhitungan tingkat keuntungan/kerugian suatu program atau suatu rencana dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai. Penerapan analisis ini banyak digunakan oleh para investor dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan hal ini maka analisis manfaat dan biaya dalam pengembangan investasi hanya didasarkan pada rasio tingkat keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan atau dalam kata lain penekanan yang digunakan adalah pada rasio finansial atau keuangan.

Dibandingkan penerapannya dalam bidang investasi, penerapan Benefit Cost Ratio (BCR) telah banyak mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan analisis BCR antara lain yaitu penerapannya dalam bidang pengembangan ekonomi daerah. Dalam bidang pengembangan ekonomi daerah, analisis ini umum digunakan pemerintah daerah untuk menentukan kelayakan

pengembangan suatu proyek.

Relatif berbeda dengan penerapan BCR di bidang investasi, penerapan BCR dalam proses pemilihan suatu proyek terkait upaya pengembangan ekonomi daerah relatif lebih sulit. Hal ini dikarenakan aplikasi BCR dalam sektor publik harus mempertimbangkan beberapa aspek terkait social benefit (social welfare function) dan lingkungan serta tak kalah penting adalah faktor efisiensi. Faktor efisiensi mutlak menjadi perhatian menimbang terbatasnya dana dan kemampuan pemerintah daerah sendiri.

Secara terinci aspek-aspek tersebut juga mempertimbangkan dampak penerapan suatu program dalam masyarakat baik secara langsung (*direct impact*) maupun tidak langsung (*indirect impact*), faktor eksternalitas, ketidakpastian (*uncertainty*), risiko (*risk*) serta shadow price. Terkait perhitungan risiko dan ketidakpastian, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan asuransi dan melakukan lindung nilai (*hedging*).

Efisiensi ekonomi merupakan kontribusi murni suatu program dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga yang menjadi perhatian utama dalam penerapan BCR dalam suatu proyek pemerintah yang berkaitan dengan sektor publik adalah redistribusi sumber daya.

Berdasarkan hasil perhitungan Net Benefit - cost ratio (Net B/C Ratio) usaha KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5. Hasil perhitungan Net B/C

Tahun	Cost	Benefit	Net Benefit	DF 12%	PVNB
0	26650000	0	-26650000	1	-26650000
1	24500000	40814600	16314600	0.892857	14566604.81
2	24500000	40814600	16314600	0.797194	13005897.97
3	24500000	40814600	16314600	0.711178	11612405.99
4	24500000	40814600	16314600	0.635518	10368221.96
5	24500000	40814600	16314600	0.567426	9257328.22
Total PVNB					58810458.95
PBNV +		58810459.95			
PBNV -		26650000			
B/C Ratio =		2.20677144 > 1			
LAYAK					

Sumber : Data Olahan

$$\text{net B/C} = \frac{PVNB(+)}{PVNB(-)}$$

$$\text{Net B/C} = 2.20677144$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh nilai Net B/C sebesar 2.20677144. ini bearti nilai Net B/C > 1 jadi usaha ini dikatakan layak.

b. Nilai IRR (*Internal Rate of Return*)

Merupakan suku bunga maksimal (*discount rate*) untuk sampai pada NPV bernilai sama dengan nol (seimbang). IRR (Tingkat Pengembalian Internal) didefinisikan sebagai tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan suatu proyek yang diukur dengan membandingkan *cash flow* yang dihasilkan proyek dengan investasi yang dikeluarkan untuk proyek tersebut.

Pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi dengan menggunakan metode IRR ini akan selaras dengan metode NPV,

walaupun kadang-kadang terjadi pertentangan antara keputusan investasi menggunakan NPV dan IRR ini. Penilaian investasi menggunakan metode IRR ini lebih sulit dibandingkan dengan metode NPV karena menggunakan cara coba-coba (*trial and error*) ketika akan menentukan besarnya *discount rate* investasi. Kesulitan ini dapat diatasi jika dalam perhitungannya digunakan computer. Jika menggunakan IRR investasi akan diterima apabila besarnya IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan sebagai biaya modal, dan sebaliknya apabila IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga biaya modal maka IRR investasi akan ditolak.

Hasil perhitungan nilai IRR dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table V.6. Hasil perhitungan IRR dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Cost	Benefit	Net Benefit	DF 20%	PVNB 20%	DF 29%	PVNB 29%	DF 30%	PVNB 30%
0	26650000	0	-26650000	1	-26650000	1	-26650000	1	-26650000
1	24500000	40814600	16314600	0.83333	13595494.56	0.775	10994619.0	0.76923	10458062.3
2	24500000	40814600	16314600	0.69444	11329576.08	0.6	7401712.1	0.59117	6697705.5
3	24500000	40814600	16314600	0.5787	9441307.964	0.465	4988106.4	0.45516	4297305.7
4	24500000	40814600	16314600	0.48225	7867764.794	0.361	3367379.7	0.35102	2761742.8
5	24500000	40814600	16314600	0.40188	6556462.504	0.279	2263037.0	0.26932	1765786.5
	DR	30%	48790605	PV Proses	48790605	PV Proses	29014854	PV Proses	25980602
	DR	20%	25980602	Investasi	26650000	Investasi	26650000	Investasi	26650000
	Selisih	10%	22810003	NPV	22140605	NPV	2454854	NPV	-669298

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan table diatas, untuk menghitung IRR kemudian dimasukkan kedalam rumus berikut ini :

$$IRR = rk + \frac{NPV_{rk}}{TPV_{rk} - TPV_{rb}} \times (rb - rk)$$

Ket :

$$IRR = 29\% + \frac{2.454.854}{22.810.003} \times 10\% = (29\% + 0.39\%) = 29.49$$

$$IRR = 30\% + \frac{-669.298}{22.810.003} \times 10\% = (30\% - 0.51\%) = 29.49$$

Berdasarkan dari perhitungan nilai IRR diatas, nilai IRR untuk adalah sebesar 29% lebih besar dari nilai tingkat suku bunga 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan karena nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga 20%.

IV.2 Pembahasan

Dari hasil perhitungan yang digunakan adalah *Net Present Value* (NPV), *Nilai Net Benefit Ratio* dan *Internal Rate Of Return* (IRR). Diketahui bahwa dengan menggunakan *Net Present Value* (NPV), setelah dikurangi jumlah PV benefit dengan PV cost maka diperoleh angka 32160459.0 ini menunjukkan angka lebih besar dari 0, sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan nilai biaya yang dipergunakan dan dikeluarkan sehingga usaha menghasilkan benefit yang lebih besar. Dengan kata lain KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu menurut kriteria Net Present Value (NPV) layak dikembangkan dan mempunyai keuntungan yang cukup besar.

Selanjutnya dengan analisis *Nilai Net Benefit Ratio* setelah dibagi antara net benefit/cost ratio maka diperoleh angka sebesar 2.2067714 ini berarti bahwa nilai yang dihasilkan adalah lebih dari 1 (Net B/C > 1). Dengan demikian ditarik suatu kesimpulan bahwa KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu menurut kriteria Net B/C Ratio layak dikembangkan dan memberikan keuntungan yang lumayan besar.

Kemudian dengan menggunakan analisis dan *Internal Rate Of Return* (IRR). KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai nilai IRR sebesar

29%, jadi angka ini lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu sebesar 20%. Dengan demikian KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu menurut kriteria IRR layak dikembangkan dan investasi yang ditanamkan memberikan keuntungan yang relatif besar kepada pengusaha tersebut.

Dari hasil perhitungan ketiga kriteria tersebut, ini menunjukkan bahwa KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu layak dikembangkan karena mempunyai prospek yang bagus.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab diatas, selanjutnya penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran tentang hasil penelitian ini.

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan yang digunakan adalah *Net Present Value (NPV)*, *Nilai Net Benefit Ratio* dan *Internal Rate Of Return (IRR)*. Diketahui bahwa dengan menggunakan *Net Present Value (NPV)*, setelah dikurangi jumlah PV benefit dengan PV cost maka diperoleh angka 24.628.470 ini menunjukkan angka lebih besar dari 0, sehingga menurut kriteria Net Present Value (NPV) layak dikembangkan dan mempunyai keuntungan yang cukup besar.
2. Selanjutnya dengan analisis *Nilai Net Benefit Ratio* setelah dibagi antara net benefit/cost ratio maka diperoleh angka sebesar 2.20677144, ini berarti bahwa nilai yang dihasilkan adalah lebih dari 1 ($\text{Net B/C} > 1$). Dengan demikian menurut kriteria Net B/C Ratio layak dikembangkan dan memberikan keuntungan yang lumayan besar.

3. Kemudian dengan menggunakan analisis *Internal Rate Of Return (IRR)*.

KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai nilai IRR sebesar 29%, jadi angka ini lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu sebesar 20%. Dengan demikian kriteria IRR layak dikembangkan dan investasi yang ditanamkan memberikan keuntungan yang relatif besar kepada pengusaha tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai transportasi sendiri, dengan begitu biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi dalam segala kegiatan usaha dapat diminimalkan seefisien mungkin sehingga pendapatan yang diperoleh dapat meningkat secara maksimal.
2. Pengembangan KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu hendaknya didukung juga oleh masyarakat dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan kemampuan, serta bersama-sama dengan instansi terkait untuk mempererat hubungan baik.
3. Pemerintah dapat turut serta mengembangkan KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu ini dengan menganjurkan atau memakai jasa KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu dalam urusan pertanian, seperti membeli bibit dan pupuk untuk keperluan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- G. Kartasapoetra dkk, 2003, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- H Hadiwidjaja, Drs , Akuntan dkk, 2001, *Modal Koperasi*. CV. Pionir Jaya, Bandung.
- Hendrojogi. 2002. *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek.*: RGFP, Jakarta.
- Ign. Sukandoyo, Drs, 1999, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Pandji Anoraga, SE., MM, dan Dra. Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*. PT. Bina Adiaksara dan PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Paul A. Samuelson dan Willliam D. Nordhaus, 1999, *Mikro-Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Pratomo Sartika Titik, Dr, 2002 *Ekonomi Skala kecil/menengah & Koperasi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono1999, *Pengantar Ekonomi Mikro*, LP3ES, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2008, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan praktek*. Erlangga : Jakarta.
- Tulus Tambunan, 2007, *Prospek Koperasi Pengusaha dan Petani di Indonesia dalam Tekanan Globalisasi Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan Dunia*, Kadin-Indonesia/Pusat Studi Industri & UKM Universitas Trisakti, Jakarta, 2007
- Widiyanti, Ninik. 2002. *Manajemen Koperasi*. Cetakan Ketujuh. PT.Rineka Cipta : Jakarta.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rincian perkembangan SHU Koperasi Unit Desa Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2003-2007	3
Tabel 5.1 Investasi KUD Gemah Ripah Kabupaten Rokan Hulu	5
Tabel 6.2 Biaya Tetap	46
Tabel 5.3 Biaya tidak tetap	46
Tabel 5.4. Total Cost.....	47
Tabel 5.5. Hasil perhitungan Net B/C	56
Tabel 5.6. Hasil perhitungan IRR dapat dilihat pada tabel dibawah ini.....	57

RIWAYAT HIDUP



Mispandi, lahir di Ponorogo pada tanggal 5 Mei 1987. Putra pertama dari pasangan Nardi dan Suratin. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar 027 Desa Rimbajaya dan lulus pada tahun 2000 kemudian pada tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Pir Trans Sei Intan dan lulus pada tahun 2003 selanjutnya pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Pemdes Ujung Batu dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan di terima di jurusan Manajemen dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kampar Kiri pada bulan Juli sampai Agustus 2008 dengan nilai yang sangat memuaskan.

Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 2010 skripsi Penulis telah dipertahankan dan diuji oleh Tim penguji dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Penulis menyelesaikan program Sarjana selama 4 Tahun 2 Bulan. Dengan demikian Penulis berhak menyanggah gelar Sarjana Ekonomi.

Pekanbaru, Desember 2010

Penulis

Mispandi